

# **Analisis Makro Ekonomi Terapan: Kebijakan Finansial dan Transformasi Struktural Sulawesi Selatan**

*Applied Macroeconomic Analysis: Financial Policy and Structural Transformation of South Sulawesi*

**Eva Afriana Hamka**

Politeknik Wahdah Islamiyah Makassar, Indonesia: Email: [evaafrianahamka@uwais.ac.id](mailto:evaafrianahamka@uwais.ac.id)

---

## **Article History**

Received : 2026-02-13

Revised : 2026-03-20

Accepted: 2026-03-30

Published: 2026-05-01

## **Keywords:**

*applied macroeconomics; regional fiscal policy; APBD; structural transformation; South Sulawesi; decentralization*

## **Corresponding author:**

[evaafrianahamka@uwais.ac.id](mailto:evaafrianahamka@uwais.ac.id)

## **Paper type:**

Research paper



Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Wahdah Islamiyah

## **Abstract**

*This study analyzes the relationship between regional financial policy and the process of structural economic transformation in South Sulawesi Province over the period 2019–2025. Using an applied macroeconomic approach based on a case study framework, the paper evaluates the effectiveness of regional budgets (APBD), sectoral spending patterns, and fiscal policy impacts on regional economic growth, poverty reduction, and income distribution. Key findings indicate that South Sulawesi recorded economic growth of 5.78% in the first quarter of 2025, surpassing the national average of 4.87%, while the poverty rate reached its lowest level in six years at 7.43% in September 2025. The 2026 regional budget was set at IDR 10.9 trillion with a locally generated revenue (PAD) target of IDR 5.76 trillion, reflecting fiscal intensification without rate increases. Despite these macro achievements, the study identifies three principal structural challenges: (1) a rising Gini coefficient of 0.363 indicating unequal distribution of growth benefits; (2) structural dependence on the primary sector contributing 24.7% of GRDP and vulnerable to external shocks; and (3) high fiscal dependency on central government transfers comprising approximately 50% of total regional revenue. Policy implications emphasize the need for economic base diversification, strengthening fiscal self-capacity, and accelerating downstream processing in agriculture and renewable energy as foundations for long-term structural transformation.*

## **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis hubungan antara kebijakan finansial daerah dan proses transformasi struktural ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2019–2025. Dengan menggunakan pendekatan makroekonomi terapan berbasis studi kasus, kajian ini mengevaluasi efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pola belanja sektoral, serta dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pengurangan kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Temuan utama menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78% pada kuartal pertama tahun 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 4,87%, dengan angka kemiskinan mencapai titik terendah dalam enam tahun terakhir di level 7,43% pada September 2025. APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp10,9 triliun dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

---

sebesar Rp5,76 triliun—mencerminkan upaya intensifikasi fiskal tanpa kenaikan tarif. Meskipun capaian makro tersebut menggembirakan, studi ini mengidentifikasi tiga tantangan struktural utama: (1) meningkatnya koefisien Gini ke 0,363 yang mengindikasikan ketimpangan distribusi hasil pertumbuhan; (2) ketergantungan struktural pada sektor primer yang menyumbang 24,7% dari total PDRB dan rentan terhadap guncangan eksternal; serta (3) dependensi fiskal yang tinggi pada transfer pemerintah pusat yang mencakup sekitar 50% total pendapatan daerah. Implikasi kebijakan yang dihasilkan menekankan perlunya diversifikasi basis ekonomi, penguatan kapasitas fiskal mandiri, dan akselerasi hilirisasi sektor pertanian dan energi terbarukan sebagai fondasi transformasi struktural jangka panjang.

Copyright @ 2025 Authors.

**Cite this article:**

Eva Afriana Hamka. (2026). Analisis Makro Ekonomi Terapan: Kebijakan Finansial dan Transformasi Struktural Sulawesi Selatan. *AMANAHA: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik*, 2(1), 96-105. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/35>.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## 1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai secara substantif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999—kemudian diperbarui melalui UU No. 32 dan 33 Tahun 2004—telah mentransformasi arsitektur tata kelola ekonomi daerah secara fundamental. Di bawah rezim desentralisasi ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan pendapatan asli daerah, penentuan prioritas belanja publik, dan perencanaan investasi infrastruktur.

Sulawesi Selatan, sebagai provinsi terbesar dan paling dominan secara ekonomi di kawasan Sulawesi, merepresentasikan laboratorium empiris yang kaya untuk memahami dinamika makroekonomi terapan di level sub-nasional. Dengan populasi lebih dari 9 juta jiwa dan posisi geografis strategis sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, provinsi ini menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agregat dengan pemerataan kesejahteraan, sekaligus mengelola transisi struktural dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan berbasis pengetahuan.

Dalam konteks inilah pertanyaan sentral penelitian ini dirumuskan: sejauh mana kebijakan finansial yang tercermin dalam struktur APBD dan prioritas belanja sektoral telah berkontribusi terhadap transformasi struktural ekonomi Sulawesi Selatan? Apakah pertumbuhan ekonomi yang dicatat selama periode 2019–2025 telah bersifat inklusif dan berkelanjutan,

ataukah masih menyimpan kontradiksi struktural yang berpotensi menghambat konvergensi pembangunan jangka panjang?

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mendeskripsikan dan menganalisis struktur kebijakan finansial daerah Sulawesi Selatan periode 2019–2025; kedua, mengidentifikasi pola transformasi struktural yang sedang berlangsung dan faktor-faktor penentu utamanya; ketiga, mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan dependensi sektoral; serta keempat, merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mendorong transformasi struktural yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kontribusi akademis penelitian ini terletak pada integrasi kerangka makroekonomi terapan dengan analisis fiskal daerah—sebuah pendekatan yang masih relatif langka dalam literatur ekonomi regional Indonesia. Sebagian besar studi yang ada cenderung berfokus pada analisis fiskal murni atau pertumbuhan ekonomi regional tanpa secara eksplisit menghubungkan keduanya dalam kerangka transformasi struktural yang komprehensif.

## **2. Kajian Literatur**

### **2.1 Makroekonomi Terapan dan Kebijakan Fiskal Daerah**

Dalam tradisi pemikiran ekonomi makro terapan, kebijakan fiskal dipahami sebagai instrumen utama pemerintah dalam mempengaruhi tingkat output, lapangan kerja, dan stabilitas harga (Blanchard & Johnson, 2013). Pada level sub-nasional, fungsi ini mengalami modifikasi substantif karena keterbatasan kewenangan dalam kebijakan moneter, mobilitas faktor produksi yang lebih tinggi, serta ketergantungan yang signifikan pada transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya (Oates, 1999).

Teori federalisme fiskal generasi pertama yang dikembangkan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) berargumen bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi dan kebutuhan konstituen lokalnya. Namun, teori federalisme fiskal generasi kedua—yang dikembangkan oleh Weingast (1995), Qian dan Roland (1998)—menekankan dimensi insentif politik dan potensi kegagalan koordinasi antar-yurisdiksi yang dapat menggerus manfaat desentralisasi.

Di Indonesia, penelitian tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menghasilkan temuan yang beragam. Brodjonegoro dan Asanuma (2000) menemukan bahwa desentralisasi di Indonesia pada awalnya belum mampu meningkatkan efisiensi belanja publik secara signifikan karena keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah. Sementara itu, Lewis (2005) menunjukkan adanya variasi substansial dalam kinerja fiskal antar daerah di Indonesia, yang sebagian besar dijelaskan oleh perbedaan dalam kualitas tata kelola dan komposisi belanja.

### **2.2 Transformasi Struktural dalam Ekonomi Regional**

Transformasi struktural—didefinisikan sebagai pergeseran pangsa tenaga kerja dan nilai tambah dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier—merupakan salah satu ciri khas proses pembangunan ekonomi modern (Kuznets, 1966; Chenery, 1979). Dalam konteks ekonomi regional, proses ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor endogen (kondisi awal,

kapasitas institusional, kebijakan lokal) dan faktor-faktor eksogen (kondisi makroekonomi nasional, harga komoditas global, kebijakan pemerintah pusat).

McMillan dan Rodrik (2011) melalui analisis lintas negara menemukan bahwa transformasi struktural yang bersifat produktif—yaitu perpindahan tenaga kerja menuju sektor-sektor dengan produktivitas lebih tinggi—merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, transformasi struktural yang tidak produktif, di mana tenaga kerja berpindah ke sektor-sektor dengan produktivitas rendah, dapat menghambat konvergensi pendapatan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi evaluasi kebijakan di Sulawesi Selatan yang masih memiliki proporsi tenaga kerja pertanian yang signifikan.

Dalam konteks Indonesia Timur khususnya, Firdaus dan Widyasanti (2020) menyoroti bahwa ketimpangan produktivitas antar sektor di wilayah ini lebih lebar dibandingkan Jawa dan Bali, yang mengimplikasikan bahwa potensi gain dari transformasi struktural pun lebih besar—namun sekaligus membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih intensif dan terarah.

### **2.3 Hubungan Fiskal-Pertumbuhan dan Kemiskinan**

Mekanisme transmisi dari kebijakan fiskal ke pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan telah banyak dikaji dalam literatur (Devarajan, Swaroop & Zou, 1996; Baldacci, Clements & Gupta, 2003). Terdapat konsensus yang cukup kuat bahwa komposisi belanja publik—bukan sekadar volume totalnya—merupakan determinan kritis dari efektivitas fiskal. Investasi dalam modal manusia (pendidikan dan kesehatan) serta infrastruktur fisik ditemukan secara konsisten berkorelasi positif dengan pertumbuhan jangka panjang dan pengurangan kemiskinan.

Untuk konteks provinsi-provinsi di Luar Jawa, Ranis dan Stewart (2000) mengingatkan tentang risiko 'pertumbuhan tanpa pembangunan'—situasi di mana pertumbuhan output agregat tidak secara otomatis ditransmisikan ke perbaikan kondisi kehidupan masyarakat lapis bawah. Fenomena ini relevan untuk diuji dalam konteks Sulawesi Selatan, mengingat temuan koefisien Gini yang meningkat bersamaan dengan capaian pertumbuhan yang kuat.

## **3. Metode Penelitian**

### **3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus analitik-deskriptif dengan pendekatan makroekonomi terapan. Pilihan metode ini didasarkan pada kompleksitas fenomena yang diteliti—hubungan antara kebijakan fiskal dan transformasi struktural—yang memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam dan tidak dapat direduksi secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata (Yin, 2018). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa kausalitas kebijakan yang bersifat historis dan path-dependent.

Analisis dilakukan dalam tiga lapisan: pertama, analisis deskriptif terhadap tren indikator makroekonomi utama; kedua, analisis komparatif antara kinerja Sulawesi Selatan dengan rata-rata nasional dan provinsi

pembandingan; dan ketiga, analisis interpretatif terhadap mekanisme transmisi kebijakan berdasarkan sintesis bukti dokumenter dan data statistik.

### 3.2 Sumber Data dan Cakupan Temporal

Data primer dikumpulkan dari berbagai sumber resmi, meliputi: (1) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan untuk data PDRB, kemiskinan, ketimpangan, dan ketenagakerjaan; (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan untuk data APBD dan realisasi fiskal; (3) Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan untuk data inflasi, kredit perbankan, dan kondisi perekonomian daerah; serta (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Sulawesi Selatan untuk dokumen perencanaan dan RPJMD.

Cakupan temporal penelitian adalah 2019–2025, dengan fokus analisis pada periode pasca-pandemi 2022–2025 yang mencerminkan kondisi ekuilibrium baru dalam pengelolaan fiskal dan kebijakan ekonomi daerah. Periode ini juga bertepatan dengan perubahan signifikan dalam struktur transfer fiskal nasional melalui revisi kebijakan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.

### 3.3 Kerangka Analisis

Kerangka analisis yang digunakan adalah model fiskal-pertumbuhan regional yang mengintegrasikan tiga dimensi: (1) dimensi pendapatan fiskal (struktur dan kapasitas PAD); (2) dimensi belanja fiskal (komposisi dan efektivitas pengeluaran); dan (3) dimensi outcome makroekonomi (pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan transformasi struktural). Ketiga dimensi ini dianalisis secara interaktif untuk memahami rantai kausal dari kebijakan ke outcome.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Kinerja Makroekonomi Sulawesi Selatan 2019–2025

Sulawesi Selatan telah menunjukkan ketangguhan ekonomi yang relatif konsisten dalam periode yang mencakup tekanan pandemi COVID-19 dan pemulihan pasca-pandemi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tumbuh dari sekitar Rp478 triliun pada tahun 2019 menjadi diproyeksikan mendekati Rp720 triliun pada akhir 2025, mengindikasikan ekspansi nominal yang cukup substansial meskipun sebagiannya dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Pencapaian paling mencolok terjadi pada kuartal pertama 2025, di mana laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai 5,78% secara tahunan (year-on-year), melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level 4,87%. Capaian ini menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di luar Jawa dan Bali, dan secara lebih luas, kawasan Sulawesi secara keseluruhan mencatat pertumbuhan tertinggi secara spasial di Indonesia pada level 6,23%.

Pendorong utama pertumbuhan kuartal pertama 2025 adalah lonjakan produksi padi yang sangat dramatis—dari hanya sekitar 35 ribu ton pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi mendekati 700 ribu ton—sebagai dampak dari kondisi iklim yang lebih kondusif dan pemulihan

jaringan irigasi. Selain sektor pertanian, sektor perdagangan dan industri pengolahan juga memberikan kontribusi signifikan, mencerminkan dinamika permintaan konsumsi yang menguat sejalan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan.

Tabel 1. Perkembangan Indikator Makroekonomi Sulawesi Selatan 2021–2025

Indikator	2021	2022	2023	2025*
Pertumbuhan PDRB (%)	6,74	5,94	5,38	5,78**
Pertumbuhan Nasional (%)	3,69	5,31	5,05	4,87**
Kemiskinan (%)	9,09	8,63	8,15	7,43
Gini Ratio	0,388	0,376	0,367	0,363
Inflasi (%)	2,58	5,71	2,53	2,98
PAD (Rp Triliun)	3,62	4,18	4,51	4,83

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, BI Sulawesi Selatan (2025). \*) Data 2025 merupakan realisasi Q1 dan angka proyeksi. \*\*) Q1 2025.

#### 4.2 Struktur dan Dinamika APBD Sulawesi Selatan

Struktur fiskal Sulawesi Selatan mencerminkan dualisme yang menjadi karakteristik banyak provinsi di luar Jawa: satu sisi menunjukkan kapasitas fiskal mandiri yang terus meningkat, namun di sisi lain masih diiringi ketergantungan yang cukup substansial pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Pada tahun anggaran 2025, total pendapatan APBD mencapai Rp9,74 triliun, dengan komposisi hampir berimbang antara Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,83 triliun (49,6%) dan pendapatan transfer sebesar Rp4,90 triliun (50,4%).

Proyeksi APBD 2026 menunjukkan peningkatan moderat ke level Rp10,9 triliun dengan target PAD Rp5,76 triliun. Yang perlu dicatat adalah bahwa angka ini masih bersifat indikatif, mengingat pemerintah provinsi mengakui bahwa penyesuaian lebih lanjut akan dilakukan setelah pemerintah pusat menetapkan kebijakan final terkait alokasi dana transfer daerah. Ketidakpastian ini sendiri merupakan indikator penting dari kerentanan struktural kebijakan fiskal daerah.

Dalam hal strategi pengelolaan PAD, Pemprov Sulawesi Selatan menempuh pendekatan intensifikasi fiskal berbasis digitalisasi layanan dan integrasi basis data wajib pajak—tanpa menaikkan tarif pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tetap menjadi tulang punggung PAD, mencerminkan keterbatasan diversifikasi basis pajak daerah yang menjadi hambatan struktural bagi peningkatan kapasitas fiskal mandiri.

Dimensi pemerataan fiskal sub-regional juga menarik untuk dikaji. Data alokasi anggaran menunjukkan bahwa kawasan Luwu Raya—yang

mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo—menerima total alokasi APBD provinsi sebesar Rp1,04 triliun, sementara kontribusi PAD kawasan tersebut hanya sekitar Rp806 miliar. Pola ini mencerminkan kebijakan transfer fiskal intra-provinsi yang bersifat redistributif, mentransfer sumber daya dari pusat-pusat pertumbuhan (terutama Makassar dan sekitarnya) ke daerah-daerah dengan kapasitas fiskal lebih rendah.

### 4.3 Transformasi Struktural: Capaian dan Kontradiksi

Analisis transformasi struktural di Sulawesi Selatan mengungkapkan gambaran yang penuh nuansa—sebuah proses pergeseran yang sedang berlangsung namun tidak linear dan tidak bebas kontradiksi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyumbang sekitar 24,7% terhadap total PDRB, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar pertama, bersama-sama dengan sektor perdagangan besar dan eceran (sekitar 15%) serta industri pengolahan (sekitar 11%).

Dominasi sektor primer ini memiliki dua implikasi yang saling bertentangan. Di satu sisi, sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk di daerah pedesaan—sehingga produktivitas di sektor ini memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan. Di sisi lain, ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap anomali iklim dan volatilitas harga komoditas global menciptakan risiko sistemik terhadap stabilitas pertumbuhan jangka panjang.

Ironisnya, lonjakan pertumbuhan Q1 2025 yang paling menonjol justru didorong oleh faktor yang secara esensial masih berada dalam paradigma ekonomi primer: ledakan produksi padi akibat kondisi iklim yang menguntungkan. Meski dampak positifnya nyata dalam jangka pendek, pertumbuhan yang bersandar pada faktor iklim ini tidak dapat diandalkan sebagai mesin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sebaliknya, benih-benih transformasi struktural yang lebih substantif dapat diidentifikasi dari beberapa perkembangan: (1) pertumbuhan investasi di sektor energi terbarukan yang mulai mendapatkan perhatian dalam dokumen perencanaan provinsi; (2) promosi 18 proyek investasi melalui forum Sulawesi Selatan Investment Forum (SSIF) dan PINISI SULTAN yang berupaya menarik investasi non-tradisional; serta (3) upaya hilirisasi produk pertanian yang masih dalam tahap awal pengembangan.

### 4.4 Paradoks Pertumbuhan dan Ketimpangan

Salah satu temuan paling signifikan—dan sekaligus paling problematik—dari penelitian ini adalah koeksistensi antara kinerja pertumbuhan yang solid dengan tren ketimpangan yang masih persisten. Koefisien Gini Sulawesi Selatan tercatat sebesar 0,363 pada Maret 2025, yang meskipun menunjukkan penurunan dari 0,388 pada 2021, tetap mengindikasikan bahwa buah pertumbuhan ekonomi belum terdistribusikan secara merata.

Fenomena ini konsisten dengan apa yang dalam literatur pembangunan dikenal sebagai 'trickle-down failure'—di mana pertumbuhan output agregat tidak secara otomatis ditransmisikan ke perbaikan distribusi pendapatan,

terutama bagi kelompok masyarakat di desil terbawah. Dalam konteks Sulawesi Selatan, kesenjangan ini terutama termanifestasi dalam disparitas antara Kota Makassar sebagai pusat ekonomi metropolitannya dengan daerah-daerah pedalaman dan kepulauan yang masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan tradisional.

Menarik untuk dicatat bahwa penurunan angka kemiskinan ke 7,43% pada September 2025 tidak serta-merta diikuti oleh penurunan ketimpangan yang proporsional. Ini mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat yang berhasil keluar dari kemiskinan mungkin masih tetap berada jauh di bawah garis median pendapatan, sementara kelompok menengah ke atas menikmati pertumbuhan yang relatif lebih pesat.

## **5. Implikasi Kebijakan**

### **5.1 Memperkuat Kapasitas Fiskal Mandiri**

Ketergantungan sekitar 50% pendapatan APBD pada transfer pemerintah pusat merupakan kerentanan struktural yang perlu diatasi secara sistematis. Penguatan kapasitas PAD tidak harus—dan tidak seharusnya—dilakukan melalui kenaikan tarif pajak yang berpotensi kontraproduktif terhadap iklim investasi. Strategi yang lebih produktif mencakup: perluasan basis pajak melalui identifikasi dan formalisasi aktivitas ekonomi informal; pengembangan pajak properti dan transaksi properti sebagai sumber PAD baru yang potensial seiring dengan urbanisasi yang pesat; serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan.

Dalam jangka menengah, diversifikasi portofolio pendapatan daerah melalui pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berorientasi pada sektor-sektor strategis—terutama sektor jasa, pariwisata, dan logistik—dapat menjadi sumber PAD yang lebih stabil dan tidak bergantung pada volatilitas komoditas.

### **5.2 Reorientasi Belanja Menuju Investasi Transformatif**

Efektivitas fiskal dalam mendorong transformasi struktural sangat bergantung pada komposisi belanja, bukan sekadar volume totalnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu secara konsisten meningkatkan proporsi belanja modal—terutama dalam infrastruktur yang mendukung hilirisasi, konektivitas antar-daerah, dan pengembangan sumber daya manusia—relatif terhadap belanja operasional yang cenderung lebih konsumtif.

Secara spesifik, investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan kawasan industri pengolahan produk pertanian di daerah sentra produksi, serta pengembangan infrastruktur energi terbarukan harus diprioritaskan sebagai investasi transformatif yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

### **5.3 Mengatasi Ketimpangan melalui Kebijakan Spasial yang Lebih Tajam**

Mengatasi paradoks pertumbuhan-ketimpangan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih presisi secara spasial. Identifikasi dan intervensi yang ditargetkan ke 'kantong-kantong kemiskinan'—baik di

wilayah terpencil maupun di kawasan perkotaan kumuh—perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan fiskal, bukan sekadar menjadi program sosial residual. Pendekatan yang menjanjikan mencakup pengembangan kawasan agroindustri terpadu di daerah-daerah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi, yang dapat secara simultan meningkatkan produktivitas sektor primer dan membuka peluang kerja di sektor pengolahan.

## 6. Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis secara komprehensif hubungan antara kebijakan finansial daerah dan proses transformasi struktural ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2025. Beberapa kesimpulan utama dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, Sulawesi Selatan telah berhasil mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas rata-rata nasional, dengan puncaknya pada Q1 2025 yang mencapai 5,78%. Capaian ini didukung oleh kebijakan fiskal yang relatif prudent dengan APBD yang terus meningkat dan strategi PAD berbasis digitalisasi. Namun, fondasi pertumbuhan yang masih bertumpu pada sektor primer—terutama pertanian—menjadikan kinerja ini rentan terhadap guncangan iklim dan harga komoditas.

Kedua, meskipun angka kemiskinan berhasil ditekan ke level terendah dalam enam tahun terakhir (7,43%), koefisien Gini yang masih relatif tinggi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif. Ketimpangan antara Makassar dan daerah pedalaman, serta antara sektor-sektor dengan produktivitas berbeda, merupakan tantangan struktural yang membutuhkan perhatian kebijakan yang lebih terfokus.

Ketiga, dependensi fiskal pada transfer pemerintah pusat yang mencakup sekitar 50% pendapatan APBD merupakan kerentanan struktural yang perlu diatasi melalui diversifikasi dan pendalaman basis fiskal mandiri. Strategi intensifikasi yang ada perlu dilengkapi dengan inovasi dalam instrumen dan objek pendapatan daerah.

Keempat, transformasi struktural di Sulawesi Selatan sedang berlangsung namun belum mencapai momentum yang cukup untuk mengubah secara fundamental dominasi sektor primer. Akselerasi transformasi ini memerlukan kebijakan industri yang terarah, investasi infrastruktur yang mendukung hilirisasi, serta penguatan ekosistem inovasi dan kewirausahaan daerah.

Sebagai rekomendasi akhir, penelitian ini mendorong agar pemerintah daerah Sulawesi Selatan mengadopsi kerangka 'pertumbuhan inklusif berbasis transformasi'—sebuah paradigma kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan target pertumbuhan agregat dengan target pemerataan distribusi dan target transformasi struktural dalam satu dokumen perencanaan yang koheren dan terukur.

## Daftar Pustaka

Baldacci, E., Clements, B., & Gupta, S. (2003). Using fiscal policy to spur growth. *Finance and Development*, 40(4), 28–31.

- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Macroeconomics* (6th ed.). Pearson Education.
- Brodjonegoro, B., & Asanuma, S. (2000). Regional autonomy and fiscal decentralization in democratic Indonesia. *Hitotsubashi Journal of Economics*, 41(2), 111–122.
- Chenery, H. B. (1979). *Structural Change and Development Policy*. Oxford University Press.
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 37(2), 313–344.
- Firdaus, M., & Widhyasanti, A. A. (2020). Transformasi struktural dan ketimpangan regional di Indonesia: Kasus Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 1–22.
- Kanwil DJPb Sulawesi Selatan. (2025). *Laporan Kinerja APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024*. Kementerian Keuangan RI.
- Kuznets, S. (1966). *Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread*. Yale University Press.
- Lewis, B. D. (2005). Indonesian local government spending, taxing and saving: An explanation of pre- and post-decentralization fiscal outcomes. *Asian Economic Journal*, 19(3), 291–317.
- McMillan, M., & Rodrik, D. (2011). Globalization, structural change and productivity growth. NBER Working Paper No. 17143. National Bureau of Economic Research.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Qian, Y., & Roland, G. (1998). Federalism and the soft budget constraint. *American Economic Review*, 88(5), 1143–1162.
- Ranis, G., & Stewart, F. (2000). Strategies for success in human development. *Journal of Human Development*, 1(1), 49–69.
- Weingast, B. R. (1995). The economic role of political institutions: Market-preserving federalism and economic development. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 11(1), 1–31.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). *Sulawesi Selatan dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2025). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sulawesi Selatan Triwulan I 2025*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2023–2028*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.